

ABSTRAK

Perkawinan merupakan awal dari hidup bersama antara seorang pria dan wanita sebagai suami isteri, sedangkan perceraian merupakan akhir dari kehidupan bersama suami isteri. Setiap orang menghendaki agar perkawinan yang dilakukannya tetap utuh sepanjang masa kehidupannya. Tetapi tidak sedikit pula perkawinan yang telah dibina dengan susah payah itu berakhir dengan sebuah perceraian. Semakin tingginya angka cerai di setiap Pengadilan Agama, tentu bukan merupakan hal yang semestinya diharapkan. Pengadilan Agama yang cenderung mudah menyetujui gugatan perceraian, terutama pada alasan perceraian dengan menggunakan Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) perlu ditinjau ulang dikarenakan tidak sejalan dengan tujuan syariat (*maqashid syari'ah*) islam diberlakukan. Sebuah cita-cita membentuk keluarga yang bahagia harus digugurkan dengan perceraian yang hanya beralasan pertengkaran, tentu ini tidak adil.

Penelitian Disertasi ini termasuk penelitian kualitatif Analistik dengan metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode survei atau *field research* dengan metode pendekatan dalam penelitian ini adalah *yuridis sosiologis*, dimana berangkat dari hukum yang ada untuk dapat diaplikasikan pada kasus-kasus yang nyata atau mempelajari aturan-aturan perundang-undangan maupun pandangan atau pendapat ahli yang digunakan untuk mengolah dan menganalisis data-data di lapangan yang disajikan dalam pembahasan.

Hasil penelitian tersebut menemukan kelemahan-kelemahan alasan perceraian dalam hukum perkawinan Islam di Indonesia yaitu pasal lain selain Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) KHI seolah-olah tidak dianggap keberadaannya karena pasal ini menjadi tumpuan alasan setiap penggugat/pemohon yang hendak mengajukan perkara perceraian di Pengadilan Agama. Di samping itu, Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dinilai terlalu mudah pembuktiannya di depan sidang Pengadilan jika dibandingkan dengan pasal yang lainnya, serta masih terdapat celah yang terlalu lebar pada Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) KHI untuk memudahkan pasangan suami istri bercerai dan memutuskan ikatan perkawinan. Konstruksi baru regulasi alasan perceraian dalam hukum perkawinan Islam di Indonesia (perspektif *maqashid syari'ah*) yang termaktub dalam Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi “antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga” diformulasi menjadi “antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang membahayakan pihak lain dan mengakibatkan terjadinya kerusakan pada agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta yang bisa dibuktikan di depan sidang Pengadilan”.

Kata Kunci: Perkawinan, Perceraian, dan Maqashid Syari'ah

ABSTRACT

Marriage is the beginning of a life together between a man and a woman as husband and wife, while divorce is the end of life with a husband and wife. Everyone wants his marriage to remain intact throughout his lifetime. But not a few marriages that have been painstakingly ended up with a divorce. The higher divorce rate in every Religious Court, certainly not something that should be expected. Religious Courts that tend to easily agree on divorce lawsuits, especially on the grounds of divorce using Article 19 letter (f) PP. 9 Year 1975 Jo. Article 116 letter (f) in the Compilation of Islamic Law (KHI) need to be reviewed because it is not in line with the objectives of Islamic Shari'a (*maqashid syari'ah*) enacted. An ideal of forming a happy family should be disqualified by divorce with only reasonable grounds for firecrackers, of course this is unfair.

This dissertation research includes qualitative research Analytical method used in this research is survey method or field research with approach method in this research is sociological juridical, where depart from existing law to be applied in real cases or studying rules legislation or views or expert opinion used to process and analyze the data in the field presented in the discussion.

The results of the study found the reasons for divorce in Islamic marriage law in Indonesia, namely article other than Article 19 letter (f) PP. 9 Year 1975 Jo. Article 116 letter (f) KHI is not considered its existence because this article becomes the foundation of the reason of each plaintiff / applicant who wishes to file a divorce case in the Religious Courts. In addition, Article 19 letter (f) PP. 9 Year 1975 Jo. Article 116 letter (f) Compilation of Islamic Law is considered too easy to prove before the court session compared to other articles, and there is still a gap that is too wide in Article 19 letter (f) PP. 9 Year 1975 Jo. Article 116 letter (f) KHI to facilitate married couples divorce and break marital ties. The new construction of regulation the reasons for divorce in Islamic marriage law in Indonesia (perspectived *maqashid syari'ah*) as set forth in Article 19 letter (f) PP. 9 Year 1975 Jo. Article 116 letter (f) Compilation of Islamic Law which reads "between husband and wife continuously disputes and quarrels and no longer harmonious life expectancy in the household" is formulated into "between husband and wife continuously disputes and quarrels that endanger the other party and resulting in the destruction of religion, soul, mind, ancestry, and property that can be proved before the court".

Keywords: Marriage, Divorce, and Maqashid Syari'ah